

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecurangan Akutansi telah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian didunia. bahkan indonesia, kecurangan akuntansi sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Sehingga kerugian tersebut merugikan negara dan semua elemen masyarakat di indonesia. Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi didunia yaitu peringkat 118 dari 182 negara (*transparancy international*, 2012). Sedangkan hasil Failed State Index, (2012) indonesia berada di urutan 100 dari 182 negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi di indonesia masih marak terjadi dan belum banyak berubah. Korupsi bahkan menjadi hal yang sangat sering terjadi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kecenderungan kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Alison, 2006 dalam Rahmawati, 2012).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di indonesia paska reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo,2009). Kecurangan akuntansi di Indonesia meningkat dengan adanya disentralisasi pengelolaan keuangan negara sampai ke level daerah. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) ada sebanyak 576 korupsi, 1928 tersangka dengan nilai suap sebesar Rp211 milyar dan total kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun, penggelembungan (mark up) dan pungutan liar (pungli) dengan masing masing 77 kasus dan 71 kasus, ICW juga menyebutkan bahwa lembaga yang tercatat paling banyak melakukan praktek korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara

sebesar Rp 1,17 triliun. Hal ini menunjukkan kasus korupsi di keuangan daerah masing masing tergolong cukup tinggi (HIPSI,2018).

Korupsi adalah ancaman serius, terutama di lampung sendiri dimana banyak dari sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari eksekutif hingga legislatif dan pemerintah daerah hingga pusat tak luput dari pelaksanaan tindak korupsi. Sehingga pada akhir akhir ini komisi pemberantas korupsi gencar untuk melakukan penyelidikan serta pengungkapan kasus terkait korupsi yang ada di provinsi lampung. Kasus yang baru saja mencuat di wilayah Provinsi Lampung yaitu dimana sudah tercatat sebanyak lima bupati dan beberapa pegawai negeri sipil yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Dimana bupati atau kepala daerah yang terkena kasus korupsi di provinsi lampung diantara lain bupati yang terjerat kasus korupsi yaitu bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Bupati Lampung Utara yaitu Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Mesuji Khamami, Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, Serta Bupati Lampung Tengah Mustafa. Dan juga terungkapnya kasus 7 Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pesawaran terjerat kasus korupsi, tidak hanya itu pada tahun 2018 ada kasus terkait OTT (operasi tangkap tangan) yang terjadi dilingkungan pemerintah kabupaten pesawaran, dimana kasus tersebut berjenis pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan pemerintahan kabupaten pesawaran. Dengan adanya kasus korupsi dan sebagainya di indonesia dan di wilayah lampug ini menyebabkan banyak kerugian dana daerah, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan (RRI.co.id).

Di pemerintah kabupaten tersendiri terlihat adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Dimana pemerintah kabupaten pesawaran meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan lampung. ([www.pesawarankab.go.id](http://www.pesawarankab.go.id)) Kecenderungan terlihat dimana pemkab pesawaran memiliki status WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK namun masih ada nya kecurangan yang terjadi di dalam sebuah instansi atau pemerintah kabupaten pesawaran, ini pun mendasari adanya keinginan untuk melaksanakan

penelitian dan melakukan observasi di lingkungan pemerintah kabupaten pesawaran tersebut.

Definisi Kecurangan Akuntansi menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (2007) adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan meski berkesenjangan dengan hukum yang berbentuk penipuan pada pihak lain, guna memperoleh suatu hasil tertentu. Adapun *Assosiation of Certified Fraud Examinations* (2004) Mengkasifikasikan Kecurangan Akuntansi dalam tiga kategori utama yaitu kecurangan laporan keuangan (*financial statment fraud*), penyalahgunaan aset (*asset missappropriation*) dan korupsi (*corruption*). Salah satu bentuk kecurangan atau fraud yang sering terjadi di indonesia adalah korupsi. Persaingan dalam dunia pemerintahan yang dilandasi oleh unsur politik telah mempengaruhi pimpinan pemerintah melakukan kecurangan. Kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja uuntuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada.

Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang disengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian. Untuk mengantisipasi adanya kecurangan akuntanasi yang mungkin terjadi didalam suatu pemerintahan/instansi maka diperlukan adanya pengendalian internal. Menurut PP No.60 Tahun 2008 pengendalian internal di perusahaan dibedakan atas pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. ketaatan perundang undangan merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasional nya. Sedangkan untuk pengamanan aset negara yang diperoleh merupakan penyerapan anggaran yang berasal dari rakyat untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara merupakan isu yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, jika terdapat kelalaian dalam pengamanan aset negara akan berakibat pada mudahnya terjadi kegiatn penggelapan, pencurian, dan bentuk manipulasi lainnya.

Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Terdapat opini bahwa

tindak kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis (Arie,2008). Indikasi adanya kecurangan akuntansi dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. IAI (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang ditimbulkan dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Salah saji yang diakibatkan dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24/2005 dalam Thoyyibatun (2012) menyebutkan bahwa aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi adalah standar akuntansi keuangan, sedangkan ketataan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya. Aturan akuntansi khususnya di pemerintahan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Arifiyani (2012) tindakan kecurangan dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Menurut Baucus (1994) dalam Hernandez dan Groot (2007), perilaku ilegal menjadi bagian dari perilaku tidak etis, sehingga perlu adanya ketentuan hukum yang mengikat sebagai salah satu usaha penegakkan standar Moralitas Individu agar kehidupan masyarakat seluruhnya dapat terjaga.

Hernandez dan Groot (2007) menunjukkan hasil penelitian bahwa lingkungan pengendalian akuntansi dan etika seseorang merupakan dua hal yang saling berkaitan dengan kecenderungannya dalam melakukan suatu Kecurangan Akuntansi. Berbagai temuan yang telah dipaparkan berdasarkan kasus-kasus Kecurangan Akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa faktor penyebab

Kecurangan Akuntansi dapat dibedakan menjadi faktor pemerintahan (eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai pelaku. Menurut Kurnia (2017) yang mengatakan bahwa pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhany (2017) mengatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, kemudian penelitian dari Novikasari (2017) mengatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati.

Pengendalian Internal yang terdiri atas lima dimensi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan merupakan dasar bagi keseluruhan sistem pengendalian intern, dimana lingkungan pengendalian yang buruk memberikan kontribusi yang signifikan dalam kegagalan efektifitas. unsur sistem pengendalian intern lainnya (Arens, 2014). Ketaatan Aturan Akuntansi merupakan kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan dan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya (Shintadevi, 2015). Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan (Thoyibatun., 2012). Namun dalam organisasi dilema etik sering muncul ketika pada saat yang sama manajemen dituntut meningkatkan keuntungan organisasi dan memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh konsumen melalui produk yang dihasilkan organisasi.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Nuraini, Muslimin, Dan Abdul Kahar (2018) yang berjudul *Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian, serta penambahan

variabel *Perilaku Tidak Etis*. Penambahan variabel yang digunakan dilakukan untuk menemukan hasil yang baru dan memperluas pada penelitian sebelumnya.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian untuk melihat pengaruh variabel tersebut dengan melibatkan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang mana adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari fenomena dan masalah yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
2. Apakah Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
3. Apakah Perilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil Penelitian dapat menjadi sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBI Darmajaya.
  - b. Hasil penelitian dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
  
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang kondisi yang berpengaruh terhadap Penegndalian Internal, Ketatan Aturan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis dalam suatu instansi pemerintahan untuk melakukan tindakan Kecurangan Akuntansi. Selain itu, penelii juga dapat berlatih untuk berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah terkait kasus Kecurangan Akuntansi sehingga bermanfaat untuk masa depan.
  - b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyikapi kasus Kecurangan Akuntansi yang terjadi khususnya di bidang pendidikan serta sebagai sarana menambah pengetahuan akuntansi.
  - c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya berkaitan dengan ilmu akuntansi dan penerapannya dalam kasus-kasus yang terjadi.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan Kecurangan Akuntansi, Pengendal Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Perilaku Tidak Etis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil hasil statistic di interpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**